

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, di Indonesia Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam suatu daerah. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.<sup>2</sup>

Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pembangunan sendiri dilaksanakan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Romhadhoni, Putri, Dita Zamrotul Faizah, and Nada Afifah. "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Matematika Integratif* 14.2 (2019): 113.

<sup>3</sup> Handayani, Novi Sri, I. Bendesa, and N. Yuliarmi. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan PDRB Per Kapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.10 (2016): 3449-3474.

Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.<sup>4</sup> Pertumbuhan ekonomi merupakan proses, bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang.

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal<sup>5</sup>.

Untuk dapat mengetahui tingkat dan pertumbuhan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional atau regional secara berkala untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional atau regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dan hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat atau daerah, maupun swasta.

---

hal.9 <sup>4</sup> Sadono Sukirno, Makroekonomi:Teori Pengantar, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2015),

<sup>5</sup> Ibid., hal. 423

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

**Tabel 1.1**

**PDRB Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Timur 2017 - 2021**

<b>Kab/Kota dg Total 38 Kab/Kota</b>	<b>PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)</b>				
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Pacitan	24893.0	27000.0	28734.0	26972.0	27807.0
Ponorogo	20336.0	22021.0	23423.0	21654.0	22336.0
Trenggalek	23202.0	24974.0	26634.0	25087.0	26124.0
Tulungagung	32635.0	35252.0	37725.0	35143.0	36629.0
Blitar	27365.0	29475.0	31388.0	29490.0	30722.0
Kediri	22922.0	24608.0	26152.0	24885.0	25961.0
Malang	34534.0	37359.0	39780.0	38495.0	40114.0
Lumajang	27616.0	29516.0	31293.0	28707.0	29881.0
Jember	27730.0	29505.0	31498.0	30023.0	31787.0
Banyuwangi	44944.0	48359.0	51788.0	47567.0	49996.0
Bondowoso	22274.0	23948.0	25584.0	25706.0	27041.0
Situbondo	25824.0	27733.0	29578.0	29244.0	30800.0
Probolinggo	25936.0	27547.0	29094.0	29280.0	30803.0
Pasuruan	77792.0	84045.0	89581.0	90747.0	97500.0
Sidoarjo	79764.0	85373.0	90618.0	94818.0	100694.0
Mojokerto	64359.0	69159.0	73651.0	73335.0	77530.0
Jombang	27787.0	30097.0	32005.0	30303.0	31486.0
Nganjuk	21738.0	23560.0	25269.0	24134.0	25280.0
Madiun	24085.0	25882.0	27724.0	25475.0	26342.0
Magetan	25920.0	28022.0	29746.0	28024.0	29056.0
Ngawi	21340.0	23058.0	24408.0	23323.0	23833.0

Lanjutan tabel 1.1					
Bojonegoro	52147.0	58727.0	62446.0	54048.0	63811.0
Tuban	48471.0	51990.0	55401.0	52085.0	54775.0
Lamongan	28836.0	31309.0	33109.0	29221.0	30267.0
Gresik	92232.0	100252.0	105676.0	102623.0	109373.0
Bangkalan	22304.0	24361.0	24978.0	22038.0	23014.0
Sampang	18390.0	19726.0	20191.0	20503.0	21097.0
Pamekasan	16941.0	18259.0	19331.0	19779.0	20690.0
Sumenep	28252.0	30135.0	30569.0	29166.0	31145.0
Kota Kediri	407215.0	447216.0	483982.0	462199.0	491270.0
Kota Blitar	41304.0	44702.0	47841.0	45090.0	47307.0
Kota Malang	72078.0	78161.0	83528.0	85540.0	90679.0
Kota Probolinggo	41438.0	44732.0	47804.0	46302.0	48507.0
Kota Pasuruan	35940.0	38714.0	41325.0	38774.0	40525.0
Kota Mojokerto	45791.0	49370.0	52536.0	49840.0	52041.0
Kota Madiun	68779.0	74302.0	79654.0	70745.0	74650.0
Kota Surabaya	171505.0	186739.0	200359.0	193010.0	204920.0
Kota Batu	69812.0	76005.0	81461.0	74884.0	78458.0

Sumber : <https://jatim.bps.go.id/>

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa PDRB tertinggi selama 5 tahun terakhir berada di kota kediri pada tahun 2017 dengan nilai 407215.0, kemudian pada tahun 2018 dengan nilai 447216.0, kemudian pada tahun 2019 dengan nilai 483982.0. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai 462199.0 dan pada tahun 2021 kembali meningkat dengan nilai 491270.0.

Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah sebuah kondisi di mana seseorang yang berasal dari golongan angkatan kerja menginginkan untuk mendapatkan pekerjaan akan tetapi masih belum mampu untuk mendapatkannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Riska Franita, "Analisa Pengangguran di Indonesia", dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 1, Desember 2016, hlm. 89

Tidak semua orang yang tidak atau belum mendapatkan pekerjaan dapat disebut sebagai pengangguran. Seseorang dari golongan angkatan kerja yang memiliki kemauan kerja dan siap kerja, tetapi tidak berusaha untuk mencari pekerjaan dalam empat minggu terakhir, kriteria tersebut tidak dapat digolongkan sebagai pengangguran.<sup>7</sup>

Pengangguran jika dilihat dari sudut pandang ekonomi tidak identik dengan istilah tidak bekerja. Seseorang yang tidak memiliki kemauan untuk bekerja, tidak dapat digolongkan ke dalam kelompok pengangguran. Seseorang yang memiliki keinginan untuk bekerja dan telah berusaha untuk mencari pekerjaan akan tetapi masih belum bisa mendapatkannya, maka seseorang tersebut baru dapat digolongkan sebagai pengangguran.<sup>8</sup>

Pengangguran termasuk ke dalam permasalahan makroekonomi yang dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi fisik dan mental seseorang secara langsung. Kondisi seseorang yang sedang menganggur dapat memicu penurunan standar dalam kehidupannya. Selain itu, kondisi menganggur yang berlangsung dalam jangka waktu cukup lama mampu menimbulkan dampak psikologis bagi kebanyakan orang.<sup>9</sup>

Pendapat Keynes dalam bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money* menyatakan bahwa, “pertambahan uang beredar akan

---

<sup>7</sup> Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), hlm. 129

<sup>8</sup> Aang Curatman, *Teori Ekonomi Makro*. (Cirebon: Swagati Press, 2010), hlm. 96

<sup>9</sup> N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi: Edisi Keenam*, terj. Fitria Liza dan Imam Nurmawan, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 154

mengurangi suku bunga, yang selanjutnya akan menambah investasi, dan penambahan investasi ini akan menambah pendapatan nasional dan mengurangi pengangguran”.<sup>10</sup>

**Tabel 1.2**

**Indikator Pengangguran di Kabupaten/Kota**

**Provinsi Jawa Timur 2017 – 2021**

<b>Kabupaten/Kota Se Jawa Timur</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur (Persen)</b>				
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kabupaten Pacitan	0.85	1.39	0.91	2.28	2.04
Kabupaten Ponorogo	3.76	3.77	3.50	4.45	4.38
Kabupaten Trenggalek	3.48	4.12	3.36	4.11	3.53
Kabupaten Tulungagung	2.27	2.53	3.29	4.61	4.91
Kabupaten Blitar	2.99	3.38	3.05	3.82	3.66
Kabupaten Kediri	3.18	4.15	3.58	5.24	5.15
Kabupaten Malang	4.60	3.15	3.70	5.49	5.40
Kabupaten Lumajang	2.91	2.46	2.73	3.36	3.51
Kabupaten Jember	5.16	4.01	3.69	5.12	5.44
Kabupaten Banyuwangi	3.07	3.59	3.95	5.34	5.42
Kabupaten Bondowoso	2.09	3.84	2.86	4.13	4.46
Kabupaten Situbondo	1.49	1.85	2.77	3.85	3.68
Kabupaten Probolinggo	2.89	4.00	3.77	4.86	4.55
Kabupaten Pasuruan	4.97	5.94	5.22	6.24	6.03
Kabupaten Sidoarjo	4.97	4.62	4.62	10.97	10.87
Kabupaten Mojokerto	5.00	4.21	3.61	5.75	5.54
Kabupaten Jombang	5.14	4.56	4.28	7.48	7.09
Kabupaten Nganjuk	3.23	2.60	3.16	4.80	4.98
Kabupaten Madiun	3.19	3.71	3.52	4.80	4.99
Kabupaten Magetan	3.80	3.82	2.98	3.74	3.86
Kabupaten Ngawi	5.76	3.75	3.60	5.44	4.25
Kabupaten Bojonegoro	3.64	4.11	3.56	4.92	4.82
Kabupaten Tuban	3.39	2.76	2.70	4.81	4.68

<sup>10</sup> Sadono Sukirno, et. all., *Pengantar Bisnis: Edisi Pertama*. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.304

Lanjutan table 1.2					
Kabupaten Lamongan	4.12	3.10	3.89	5.13	4.90
Kabupaten Gresik	4.54	5.71	5.40	8.21	8.00
Kabupaten Bangkalan	4.48	5.09	5.62	8.77	8.07
Kabupaten Sampang	2.48	2.38	2.71	3.35	3.45
Kabupaten Pamekasan	3.91	2.88	2.26	3.49	3.10
Kabupaten Sumenep	1.83	1.75	2.08	2.84	2.31
Kota Kediri	4.68	3.56	4.15	6.21	6.37
Kota Blitar	3.76	3.98	4.54	6.68	6.61
Kota Malang	7.22	6.65	5.88	9.61	9.65
Kota Probolinggo	3.42	3.56	4.25	6.70	6.55
Kota Pasuruan	4.64	4.50	4.89	6.33	6.23
Kota Mojokerto	3.61	2.44	2.63	6.74	6.87
Kota Madiun	4.26	3.80	3.96	8.32	8.15
Kota Surabaya	5.98	6.01	5.76	9.79	9.68
Kota Batu	2.26	3.07	2.42	5.93	6.57

Sumber : <https://jatim.bps.go.id/>

Berdasarkan tabel tersebut, dijelaskan bahwa pada tahun 2017 tingkat pengangguran tertinggi berada di kota malang dengan persentase 7,22%. Kemudian pada tahun 2018 tingkat pengangguran tertinggi berada di kota malang dengan persentase nilai 6,65%, kemudian pada tahun 2019 tingkat pengangguran tertinggi terjadi di kota Surabaya dengan persentase 5,76% kemudian pada tahun 2020 tingkat pengangguran tertinggi berada di kabupaten sidoarjo dengan persentase nilai 10,97%, kemudian pada tahun 2021 tingkat pengangguran tertinggi kembali terjadi di kabupaten sidoarjo dengan persentase nilai 10,87%.

Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali di kembangkan oleh statistikus Italia yang bernama Corrado Gini dan

dipublikasikan pada tahun 1912 (*International NGO Forum on Indonesian Development, 2018*). Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Rasio gini dinyatakan dalam angka 0 sampai 1. Jika rasio gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.<sup>11</sup>

Daimon dan Thorbecke berpendapat bahwa penurunan ketimpangan selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat 2 aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- 1) Variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis.
- 2) merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan. Dalam kurva lorenz, garis diagonal merupakan penjelasan dari pemerataan distribusi pendapatan di setiap titik pada garis diagonal tersebut menunjukkan presentase penduduk yang berada di suatu wilayah yang sama dengan presentase penerimaan pendapatan.

---

<sup>11</sup> Todaro, Michael P. "stephen C. Smith." *Economic development* 10 (2006).

**Tabel 1.3****Rasio Gini Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 2017-2021**

<b>Kabupaten/Kota di Jawa Timur</b>	<b>Gini Rasio Menurut Kabupaten Kota di Jawa Timur (persen)</b>				
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kabupaten Pacitan	0.32	0.35	0.40	0.35	0.34
Kabupaten Ponorogo	0.34	0.35	0.35	0.38	0.37
Kabupaten Trenggalek	0.35	0.39	0.37	0.38	0.34
Kabupaten Tulungagung	0.35	0.37	0.30	0.34	0.33
Kabupaten Blitar	0.37	0.38	0.33	0.35	0.35
Kabupaten Kediri	0.34	0.33	0.30	0.33	0.33
Kabupaten Malang	0.35	0.38	0.38	0.37	0.37
Kabupaten Lumajang	0.31	0.32	0.30	0.30	0.31
Kabupaten Jember	0.34	0.34	0.30	0.32	0.34
Kabupaten Banyuwangi	0.34	0.31	0.31	0.32	0.37
Kabupaten Bondowoso	0.32	0.35	0.30	0.33	0.33
Kabupaten Situbondo	0.33	0.36	0.32	0.30	0.32
Kabupaten Probolinggo	0.36	0.34	0.33	0.33	0.33
Kabupaten Pasuruan	0.34	0.32	0.31	0.35	0.34
Kabupaten Sidoarjo	0.34	0.35	0.31	0.34	0.35
Kabupaten Mojokerto	0.32	0.31	0.27	0.33	0.29
Kabupaten Jombang	0.34	0.32	0.33	0.33	0.33
Kabupaten Nganjuk	0.33	0.31	0.42	0.33	0.31
Kabupaten Madiun	0.32	0.33	0.33	0.36	0.36
Kabupaten Magetan	0.39	0.38	0.36	0.32	0.36
Kabupaten Ngawi	0.34	0.35	0.34	0.34	0.31
Kabupaten Bojonegoro	0.29	0.35	0.31	0.30	0.34
Kabupaten Tuban	0.31	0.36	0.30	0.34	0.34
Kabupaten Lamongan	0.32	0.31	0.32	0.30	0.29
Kabupaten Gresik	0.29	0.27	0.28	0.30	0.31
Kabupaten Bangkalan	0.30	0.29	0.31	0.32	0.30
Kabupaten Sampang	0.29	0.26	0.27	0.26	0.27
Kabupaten Pamekasan	0.33	0.33	0.34	0.32	0.32
Kabupaten Sumenep	0.24	0.25	0.30	0.26	0.29
Kota Kediri	0.40	0.33	0.32	0.35	0.37

Lanjutan table 1.3					
Kota Blitar	0.39	0.35	0.34	0.34	0.37
Kota Malang	0.42	0.41	0.34	0.40	0.41
Kota Probolinggo	0.37	0.31	0.27	0.31	0.30
Kota Pasuruan	0.38	0.34	0.31	0.30	0.35
Kota Mojokerto	0.39	0.34	0.31	0.35	0.33
Kota Madiun	0.36	0.36	0.35	0.39	0.34
Kota Surabaya	0.39	0.36	0.41	0.34	0.35
Kota Batu	0.30	0.33	0.32	0.33	0.31

Sumber : <https://jatim.bps.go.id/>

Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2017 rasio gini tertinggi terjadi di daerah kota malang dengan persentase 0,42% , kemudian pada tahun 2018 rasio gini tertinggi terjadi di kota malang dengan persentase 0,41%, kemudian pada tahun 2019 rasio gini tertinggi terjadi di daerah Kabupaten Nganjuk dengan persentase 0,42%. Kemudian pada tahun 2020 rasio gini tertinggi terjadi di daerah Kota Malang dengan nilai 0,40%. Kemudian pada tahun 2021 rasio gini kembali terjadi di daerah Kota Malang dengan nilai 0,41%.

Ketimpangan merupakan masalah yang juga dihadapi oleh setiap negara, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Distribusi pendapatan mencerminkan terjadinya pemerataan atau ketimpangan pembagian dari hasil pembangunan di suatu negara terhadap penduduknya. Kondisi daerah yang baik tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tetapi juga dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik.

Distribusi pendapatan yang relatif baik ditandai dengan kondisi di mana perbedaan antara golongan masyarakat kaya dan miskin yang tidak terlalu menyolok dalam perekonomian daerah bersangkutan. Salah satu pengukuran yang dapat digunakan untuk melihat distribusi pendapatan tersebut ialah gini ratio.<sup>12</sup>

Menurut Todaro, ketimpangan tidak hanya membawa dampak negatif tetapi juga terdapat dampak positifnya. Dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim ialah adanya inefisiensi ekonomi, sosial dan solidaritas menjadi lemah. Selain itu, tingginya ketimpangan umumnya dipandang sebagai ketidakadilan. Munculnya masalah ketimpangan berasal dari distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan<sup>13</sup>

Gini ratio adalah parameter yang digunakan untuk mengukur kesenjangan atau ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan pendapatan antara kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dengan kelompok masyarakat yang penghasilannya rendah. Sedangkan menurut Todaro, ketimpangan pendapatan ialah kondisi di mana terdapat perbedaan penerimaan pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat.

---

<sup>12</sup> Paulus Kurniawan dan Made , Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro Edisi 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 102

<sup>13</sup> Abdul Rahman Suleman dan Abdurrozzaq Hasibuan, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kota Padangsidempuan”, Jurnal Buletin Utama Teknik, vol. 17, no. 1. 2021, hlm. 46

Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan seluruh orang yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dengan kurun waktu 6 bulan atau bahkan lebih dan atau mereka yang bertempat tinggal tidak sampai 6 bulan, namun mempunyai tujuan menetap. Jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk maka tingkat konsumsi ikut meningkat

Dengan adanya kenaikan tersebut akan diikuti peningkatan tingkat produksi guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut Sandhiaka jumlah penduduk dapat berpengaruh negative pada pertumbuhan ekonomi apabila tidak ada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan peningkatan kualitas pendidikan yang memadai sehingga berakibat pada rendahnya produktifitas.<sup>14</sup>

Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat di kelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan yang mana hal ini bisa berdampak baik untuk negara jika di sertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara.

---

<sup>14</sup> Effendy, Corinna Amelia, and Sjamsu Djohan. "Pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota." *KINERJA* 18.4 (2022): 680-688.

Namun jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi beban bagi pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.<sup>15</sup> Menurut Robert Malthus menganggap bahwa pada kondisi awal jumlah penduduk memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun pada suatu keadaan optimum pertambahan penduduk tidak akan menaikkan pertumbuhan ekonomi malahan dapat menurunkannya.<sup>16</sup>

**Tabel 1.4**

**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur  
2017 – 2021**

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur (ribu jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pacitan	553388	554394	555304	586110	589108
Kabupaten Ponorogo	869894	870705	871370	949318	955839
Kabupaten Trenggalek	693104	694902	696295	731125	734888
Kabupaten Tulungagung	1030790	1035290	1039284	1089775	1096588
Kabupaten Blitar	1153803	1157500	1160677	1223745	1231013
Kabupaten Kediri	1561392	1568113	1574272	1635294	1644400
Kabupaten Malang	2576596	2591795	2606204	2654448	2668296
Kabupaten Lumajang	1036823	1039794	1042395	1119251	1127094
Kabupaten Jember	2430185	2440714	2450668	2536729	2550360
Kabupaten Banyuwangi	1604897	1609677	1613991	1708114	1718462
Kabupaten Bondowoso	768912	772297	775715	776151	778525
Kabupaten Situbondo	676703	679993	682978	685967	688337
Kabupaten Probolinggo	1155214	1162092	1168503	1152537	1155894

<sup>15</sup> Bambang utoyo , Geografi membuka cakrawala dunia untuk kelas XI Sekolah Menengah Atas /Madarasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial.PT Setia Purna .h.28

<sup>16</sup> Novri Silastri, “ Pengaruh jumlah penduduk dan pendapatan domestic regional bruto ( PDRB) terhadap kemiskinan di kabupaten kuantan singing; jurnal Jom fekon,Vol.4 no.1 ( Februari 2017 ) hal.106

Lanjutan table 1.4					
Kabupaten Pasuruan	1605307	1616578	1627396	1605969	1611805
Kabupaten Sidoarjo	2183682	2216804	2249476	2082801	2091930
Kabupaten Mojokerto	1099504	1108718	1117688	1119209	1125522
Kabupaten Jombang	1253078	1258618	1263814	1318062	1325914
Kabupaten Nganjuk	1048799	1051900	1054611	1103902	1109683
Kabupaten Madiun	679888	681394	682684	744350	750143
Kabupaten Magetan	628609	628924	628977	670812	674133
Kabupaten Ngawi	829899	830090	830108	870057	873346
Kabupaten Bojonegoro	1243906	1246927	1249692	1301635	1307602
Kabupaten Tuban	1163614	1168277	1172790	1198012	1203127
Kabupaten Lamongan	1188478	1188913	1189106	1344165	1356027
Kabupaten Gresik	1285018	1299024	1312881	1311215	1320570
Kabupaten Bangkalan	970894	978892	986672	1060377	1071712
Kabupaten Sampang	958082	968520	978875	969694	976020
Kabupaten Pamekasan	863004	871497	879992	850057	853507
Kabupaten Sumenep	1081204	1085227	1088910	1124436	1129822
Kota Kediri	284002	285582	287409	286796	287962
Kota Blitar	139995	140971	141876	149149	150371
Kota Malang	861414	866118	870682	843810	844933
Kota Probolinggo	233123	235211	237208	239649	241202
Kota Pasuruan	197696	199078	200422	208006	209528
Kota Mojokerto	127279	128282	129014	132434	133272
Kota Madiun	176099	176697	177007	195175	196917
Kota Surabaya	2874699	2885555	2896195	2874314	2880284
Kota Batu	203997	205788	207490	213046	214653

Sumber : <https://jatim.bps.go.id/>

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa, jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2019 berada di kota surabaya dengan nilai 2.896.195 ribu jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah berada di kota madiun dengan nilai 177.007 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2020 jumlah penduduk tertinggi berada di kota surabaya 2.874.314 ribu jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di kota madiun dengan nilai 195.175 ribu jiwa. Kemudian pada tahun

2021 jumlah penduduk tertinggi berada di kota surabaya dengan nilai 2.880.284 ribu jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di kota madiun dengan nilai 196.917 ribu jiwa.

Dari data dan analisis diatas, tingginya jumlah pengangguran, rasio gini dan jumlah penduduk akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji **“Pengaruh Jumlah Pengangguran, Rasio Gini, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah jumlah pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
2. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji jumlah pengangguran berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menguji inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

3. Untuk menguji jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

#### **D. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini dibatasi pada data di BPS terkait Jumlah Pengangguran, Rasio Gini, Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Perekonomian Di Provinsi Jawa Timur. Selain itu peneliti ingin mengkaji terkait persoalan perekonomian dan faktor apa saja yang mempengaruhi perekonomian di Provinsi Jawa Timur, dengan mengandalkan data di BPS dan kajian pustaka penelitian terdahulu.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini yang dilakukan adapun kegunaan penelitian ada 2 yaitu bersifat secara teoritis dan praktis, berikut penjelasannya:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Serta dapat memberikan masukan dan informasi secara teoritis mengenai Jumlah Pengangguran, Rasio Gini, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berharga dan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai pengaruh jumlah pengangguran, Rasio Gini dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.

### b. Bagi Masyarakat

Memberikan tambahan informasi yang bermanfaat bagi setiap pihak yang terkait dan berkepentingan yang berkaitan dengan home industri.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya pada bidang kajian yang sama dengan faktor atau variabel yang berbeda

## **F. Definisi Konseptual**

### a) Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.<sup>17</sup>

### b) Rasio gini

Gini ratio adalah parameter yang digunakan untuk mengukur kesenjangan atau ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan pendapatan antara kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dengan kelompok masyarakat yang penghasilannya rendah. Sedangkan menurut Todaro, ketimpangan pendapatan ialah kondisi di mana terdapat perbedaan penerimaan pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat.

### c) Jumlah Penduduk

Penduduk adalah sejumlah manusia baik secara individu maupun kelompok yang menempati wilayah atau negara tertentu minimal dalam jangka waktu satu tahun pada saat dilaksanakan pendataan atau sensus penduduk. Sedangkan menurut Said, yang dimaksud dengan penduduk adalah “jumlah orang yang bertempat

---

<sup>17</sup> Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, 8.

tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi.<sup>18</sup>

d) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.<sup>19</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari enam sub bab, sistematika skripsi bertujuan untuk memudahkan dan memperjelas pembahasan dan analisis data. Maka dari itu sistematika skripsi adalah :

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini dijelaskan dengan rinci tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup serta batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pada penulisan

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini mulai mengkaji teori yang diurai dari penelitian terdahulu. Teori teori dari buku dan bahasa mengenai variabel dan kerangka komseptual di penelitian.

---

<sup>18</sup> Bambang utoyo , *Geografi membuka cakrawala dunia untuk kelas XI Sekolah Menengah Atas /Madarasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*.PT Setia Purna .hlm.26

<sup>19</sup> Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta,2013, hlm. 4

**BAB III METODE PENELITIAN.** Bab ini berisi pendekatan dan jenis pada penelitian, sampel dan populasi, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan tahapan tahapan di dalam penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN.** Bab ini mengkaji tentang isi data dalam pertanyaan pada penelitian dan hasil analisis data pada obyek dari pengamatan dan informasi yang bisa digali.

**BAB V PEMBAHASAN.** Bab ini merupakan bahasan dari temuan atau hasil penelitian dengan mengacu pada teori teori yang didapat dari observasi langsung.

**BAB VI PENUTUP.** Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari sripsi dan dilengkapi saran. Bab ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran, surat keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup